

FOKUS DAN RUANG LINGKUP

Jurnal ini memfokuskan pada bidang Kebijakan Hukum. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum menerima naskah karya tulis ilmiah di bidang hukum dan kebijakan hasil penelitian, kajian, dan tinjauan hukum yang belum pernah dipublikasikan di media lain.

LEMBAGA PENERBIT

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (JIKH) diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM R.I.

p-ISSN 1978-2292

e-ISSN 2579-7425

Edisi jurnal elektronik tersedia pada:

<http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan>

INDEKSASI

Google Scholar; Indonesian Scientific Journal Database (ISJD); Public Knowledge Project (PKP) Index; CiteULike; Academic Research Index (Research Bib); Zotero; Indonesia One Search; Neliti; dan Bielefeld Academic Search Engine (BASE)

FREKUENSI PUBLIKASI

Terbit sebanyak tiga kali dalam setahun, pada bulan Maret, Juli, dan November.

KETENTUAN BIAYA PUBLIKASI ARTIKEL

Setiap artikel yang disampaikan ke Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum tidak dikenakan 'Biaya Pemrosesan Artikel'. Ini mencakup review mitra bestari, pengeditan, penerbitan, pemeliharaan dan pengarsipan, dan memungkinkan akses langsung ke versi teks lengkap dari artikel.

ALAMAT KORESPONDENSI

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jalan H.R. Rasuna Said
Kavling 4-5, Jakarta Selatan
12940
Telepon 021- 2525015
Faksimili 021-2526438
Laman :
www.balitbangham.go.id
Email:
ejournalkebijakan@gmail.com

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Indexed by:



PKP|INDEX



zotero



Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum merupakan media ilmiah kebijakan hukum berupa hasil penelitian dan kajian, tinjauan hukum, wacana ilmiah dan artikel, terbit tiga kali setahun pada bulan Maret, Juli dan November.

- Penasehat** : **Ma'mun, Bc.I.P., S.H., M.H.**
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Penanggung Jawab** : **1. T. Daniel L Tobing, S.H.**
Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Drs. Yasmon, M.L.S.
Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
- Ketua Dewan Redaksi** : Fitriyani, S.H., M.Si.
- Anggota Dewan Redaksi** : 1. Taufik H. Simatupang, S.H., M.H.
2. Nizar Apriansyah, S.E., M.H.
3. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.
4. Edward James Sinaga, S.Si., M.H.
- Tim E-Journal**
- Journal manager** : M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P.
- Editor** : 1. Ahmad Jazuli, S.Ag., M.H.
2. Trisapto Wahyu Agung Nugroho, S.S., M.Si.
3. Haryono, S.Sos., M.H.
4. Imam Lukito, S.T., M.H.
- Sekretaris** : Asmadi, S.H.
- Anggota Sekretariat** : 1. Suwartono
2. Susana Andi Meyrina, S.Sos., M.AP.
- Desain Grafis dan Teknologi Informasi** : 1. Macyudhie, S.T.
2. Risma Sari, S.Kom
3. Saefullah, S.ST., M.Si
4. Agus Priyatna, S.Kom
- Alih Bahasa** : Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, S.S., M.Si.

Alamat Redaksi

Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. 021-2525015 ext. 512 /514 Fax. 021-2522954

balitbangkumham@gmail.com
ejournalkebijakan@gmail.com

DAFTAR ISI

HASIL PENELITIAN (*ARTICLES*)

1. Kebijakan Perlakuan Khusus terhadap Narapidana Risiko Tinggi di Lembaga Pemasyarakatan 231 - 247
Haryono
2. Redefinisi Tanggung Jawab Negara dalam Kasus Kepailitan PT Istaka Karya Ditinjau dari *Three Keywords Theory*..... 249 - 261
M. Beni Kurniawan
3. Optimalisasi Peran Timpora Pasa Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan..... 263 - 285
Trisapto Wahyudi Agung Nugroho
4. Kendala Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA)..... 287 - 303
Budy Mulyawan
5. Forum MAHKUMJAKPOL-BNN-MENKES-MENSOS dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika 305 - 336
Muhar Junef

TINJAUAN HUKUM (*REVIEW*)

6. Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-Undangan.....337 - 347
Nurul Qamar dan Hardianto Djanggih
7. Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah dalam Pembangunan *E-Commerce*..... 349 - 367
Imam Lukito

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum kembali terbit menemui para pembacanya. Salawat serta salam tak lupa pula disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah merubah cakrawala berpikir umat manusia dari pemikiran tradisional mistis ke era rasionalitas ilmiah modern.

Eksistensi dan keberkaraan suatu penerbitan jurnal ilmiah di berbagai lembaga Litbang selalu menjadi masalah sekaligus tantangan bagi setiap pengelolanya, selain dari minimnya anggaran, kurangnya SDM, minimnya artikel/tulisan masuk dan penyesuaian ketentuan penulisan ilmiah yang disyaratkan oleh instansi pembina.

Pada terbitan Volume 11 Nomor 3 Bulan November 2017 ini, kami memuat hasil-hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia, diantaranya di bidang Pemasyarakatan, Peradilan, Hukum, dan Keimigrasian. Disamping itu, terdapat dua tulisan yang bersifat review tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum *Cyber Law* yang terbit kali ini. Naskah tulisan yang masuk telah diseleksi secara ketat oleh Dewan Redaksi serta melalui penelaahan dan penilaian dari Mitra Bestari. Oleh karena itu tidak semua tulisan yang masuk dapat dimuat pada Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum terbitan ini. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga kualitas substansi tiap-tiap tulisan, sehingga mutu dan kualitas tulisan tetap terjaga sesuai analisis dan pembahasannya. Dari hasil seleksi dimaksud kami memuat tulisan berupa hasil penelitian yang ditulis oleh Peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum di Indonesia, serta unit lainnya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada para Mitra Bestari yang telah melakukan penelaahan, analisis dan penilaian atas kelayakan tulisan untuk dimuat di Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada seluruh penulis yang telah berkenan menyumbangkan artikel/tulisannya.

Akhirnya, kami berharap semua hasil penelitian dan tinjauan hukum yang dimuat dalam jurnal ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan dan pembangunan hukum dan kebijakan di Indonesia. Kami pun terbuka dalam menerima kritik dan saran konstruktif sebagai perbaikan dan penyempurnaan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum di masa yang akan mendatang.

Selamat Membaca,

REDAKSI

Volume 11, Nomor 3, November 2017

**p-ISSN 1978 - 2292
e-ISSN 2579 - 7425**

JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM
PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN**

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Haryono (A researcher of the Agency of Research and Development of Law and Human Rights, the Ministry of Law and Human Rights)

VIP Treatment Policy of High-Risk Convict at Correctional Institutions

Scientific Journal of Law Policy, Volume 11, Number 3, November 2017

The state obliges to rehabilitate one's life better than in jail and can live a normal life in the community. Therefore, it is necessary to build a treatment system to convicts. Category and number of high-risk prisoners become higher are responded by Directorate General of Correctional by determining the policy of treatment to them. This research aims to find out the VIP treatment to high-risk inmates and its implementation at correctional institutions. This research is descriptive with a qualitative approach. Collecting data by observation and focus group discussion. Model of VIP treatment to certain convicts is one condition to get the effectiveness of education in correctional. The result of this research shows that the treatment of high-risk inmates at the correctional institution Clas III of Gunung Sindur has not been implemented, yet, in accordance with the Regulation of the Director General of Corrections Number PAS-58.OT.03.01 the Year 2010 on Procedures for the Treatment of High-Risk inmates. This fact caused by obstacles such as the lack of regulation socialization, human resources and infrastructure and facilities.

Keywords: policy of correctional, VIP treatment, high-risk convicts

M. Beni Kurniawan (Alumnus of Program Study of the Syaria` Faculty and Law of faculty of law at Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta, Magister Student at Faculty of Law of Indonesia University)

Redefinition of State's Responsibility of The Bankruptcy of PT Istaka Karya Reviewed From Three Keywords Theory

Scientific Journal of Law Policy, Volume 11, Number 3, November 2017

When the state carries out an equity capital at PT Istaka Karya (state-owned enterprise), the state's position is only as a shareholder. The problem in this research is how the state's responsibility of the bankruptcy of PT Istaka Karya viewed from Three Keywords Theory. This research uses a juridical normative method with secondary data. The result of this research shows that state assets separated from PT. Istaka Karya, when it comes to the risk, so it will become a business risk, not state risk. This research concludes that PT Istaka Karya is a state-owned enterprise that can be bankrupted reviewed from Three Keywords Theory. The separation of state assets, from aspects of arrangement, accountability, and the risk, the status of state assets has changed become PT Istaka Karya's assets. The Judge's verdict of the Commercial Court of Central Jakarta Number: 73/PAILIT/2010/PN.JKT. The bankruptcy of PT Istaka Karya does not put the principles of the three keywords theory in conceiving the state finances. Recommendation of this research that is a preventive step, a potency of business risks losses. The state is a shareholder can engage in a practice of good corporate governance of state-owned enterprise. As a repressive effort, the state can ask for legal accountability to the director of an enterprise through a judicial process.

Keywords: bankruptcy, istaka karya, three keywords theory

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Trisapto Wahyudi Agung Nugroho (A researcher of the Agency of Research and Development of Law and Human Rights, the Ministry of Law and Human Rights)

Role Optimization of The Foreigners Supervision Team Post The Presidential Decree Number 21/2016 on Visa Visit Exemption

Scientific Journal of Law Policy, Volume 11, Number 3, November 2017

The purpose of this research is to find out the arrangement of supervision of the foreigners regulation, mechanism and the faced obstacles by the Team of Foreigners Supervision (Timpora) in its implementation post the Presidential Decree Number 21/2016 on Visa Visit Exemption. This research uses mix-method approach, quantitative and qualitative approaches. The results show that the first; foreigners supervision is just completeness of immigration documents. The authority of supervision is dominated by immigration officials, other members (institutions) just give input/information related to foreigners. The second; administrative supervision mechanism more detailed than their existence and activities. And the third: the obstacles found in foreigners supervision are the lacks of human resources both quantities and qualities, lack of competency in intelligent skills. The coordination has not optimized yet, still find sectoral ego among the members of the team. Then shortages of the fund also become a problem in supervision activities. This research recommends to stakeholders for improvement and optimization of foreign supervision, namely: (a) it is necessary to evaluate Presidential Regulation No. 21 of 2016 on visa visit exemption, and tighten the entry permit of countries which often lead problems much; b) it is necessary to synergy and coordination amongst institution. (c) it is needed to make standard operating procedure (SOP) in detailed which contains a clear task and functions.

Keywords: visa visit exemption, immigration, team of foreigners supervision

Budy Mulyawan (Immigration official at The Directorate General of Immigration and A lecturer at the Polytechnic of Immigration)

Handicap of Implementation of Foreigners Reporting Application

Scientific Journal of Law Policy, Volume 11, Number 3, November 2017

The Foreigners Reporting Application is an online application system that is useful to help and make an ease of foreigners reporting process. For immigration officials, this application can be used as one of data or information in foreigners supervision. A lot of people do not know the purpose of this, including the immigration officials, even some of them think that this application just makes an extra work and waste time. This study aims to determine the benefits of Foreign Reporting Applications in assisting the implementation of foreigners supervision and how the constraints faced in the implementation of Foreign Reporting Applications. The method used is empirical juridical by conducting field research at the Directorate General of Immigration. The results showed that for various reason, hotels/homestays or individual do not run this application, whereas by registering and fill reporting format in the application, they do not have report their guests or visitors to the immigration office, manually. Moreover, immigration offices have not carried out pro-justice, yet to the owners of hotels/homestays or individual that do not do registration, so it does not cause deterrent effect.

Keywords: handicap, implementation, foreigners reporting application

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Muhar Junef (A researcher of the Agency of Research and Development of Law and Human Rights, the Ministry of Law and Human Rights)

Forum of MAHKUMJAKPOL-Narcotic National Board-The Ministry of Health - The Ministry of Social Affairs in Handling of Narcotics Crime

Scientific Journal of Law Policy, Volume 11, Number 3, November 2017

The forum of MAKNUMJAKPOL-Narcotic National Board-The Ministry of Health - The Ministry of Social Affairs has been enacted for three years, but its implementation has not been effective, yet. As there is not the same perception amongst them to handle the narcotics crime. This research uses a field research method with qualitative approach related to the issue. The research sites are Jakarta province, West Kalimantan province, and the North Sumatera province. The result of this research shows that the joint decree has not been implemented yet. It is needed to socialize and explain to all institutions to coordinate and their cooperation, optimally to complete narcotics issues in order to lower the number of narcotics addicts and drug abuse victims through a rehabilitation program.

Keywords: forum of mahkumjakpol plus, handle of narcotics crime

Nurul Qamar (Division of State Administrative Law, the faculty of law of Indonesia Moslem University)

Hardianto Djanggih (Division of Criminal Law, the faculty of law of Luwuk Tompotika University)

Role of Legal Language in Formulation of Legislation Norms

Scientific Journal of Law Policy, Volume 11, Number 3, November 2017

Role of legal language has an important meaning in legislation norms formulation. A legal science is a branch of knowledge that perch on its own entity (sui generis), therefore it belongs to logical itself, that is legal logic and for need, interest, a benefit of knowledge both academic and practical. The problems that will research is how distinction of language in legal science perspective. This article emphasizes on literatures study. It concludes that legal science has its own language, namely legal language. The legal science with all its stratification of knowledge and its structure or legal classification and system of all supporting elements, full of legal languages that contains articulation of characteristics as language of legal knowledge and practical, so to understand its discipline well, it is necessary to use its own language that is legal language.

Keywords: language, legal, legislation

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Imam Lukito (A researcher of the Agency of Research and Development of Law and Human Rights, the Ministry of Law and Human Rights)

Legal Challenges and Government`s Role in E-Commerce Development

Scientific Journal of Law Policy, Volume 11, Number 3, November 2017

Statistically, year by year, e-commerce trade activities shows a significant increase. It is influenced by the development of information and communication technology. E-commerce has a high potency for Indonesia and one of the national economic supports. This research analyses the legal challenges in e-commerce business and government role in supporting a rise of new business actors. It uses a qualitative method, a descriptive analysis and it is a literature study. It also concludes that first, legal challenges in e-commerce development namely; the form of legal entity, licensing; legal aspect and legal protection of the parties in the e-commerce community; and second, government`s role in e-commerce business development is to improve national legal system according to dynamics of telematics development and issuing regulations containing aspects of funding, taxes, consumers protection, education and human resources, infrastructure of communication system, logistic, cyber-security and executive management of e-commerce roadmap.

Keywords: *legal challenges, government`s role, e-commerce*

**Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak Ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya**

Haryono (Peneliti Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Kebijakan Perlakuan Khusus terhadap Narapidana Risiko Tinggi di Lembaga Pemasyarakatan

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 11, Nomor 3, November 2017

Negara berkewajiban untuk merehabilitasi seseorang agar kehidupannya lebih baik setelah keluar dari penjara. Oleh karena itu diperlukan satu sistem yang jelas mengenai perlakuan terhadap narapidana. Meningkatnya kategori dan jumlah narapidana resiko tinggi disikapi oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan menetapkan kebijakan perlakuan terhadap narapidana resiko tinggi di lembaga pemasyarakatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan khusus terhadap narapidana resiko tinggi serta implementasi kebijakan perlakuan khusus terhadap narapidana resiko tinggi di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data penelitian ini dengan pengamatan dan *focus group discussion*. Model perlakuan khusus kepada narapidana tertentu merupakan salah satu syarat untuk mencapai efektifitas pelaksanaan pembinaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa Perlakuan terhadap narapidana resiko tinggi di Lapas Klas III Gunung Sindur belum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-58.OT.03.01 tahun 2010 tentang Prosedur Tetap Perlakuan Narapidana Risiko Tinggi. Hal ini disebabkan karena masih ada kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan pedoman perlakuan terhadap narapidana resiko tinggi dari sisi sosialisasi peraturan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

Kata Kunci: kebijakan pemasyarakatan, perlakuan khusus, narapidana resiko tinggi

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak Ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya

M. Beni Kurniawan (Alumnus Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta/Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia)

Redefinisi Tanggung Jawab Negara dalam Kasus Kepailitan PT Istaka Karya Ditinjau dari *Three Keywords Theory*

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 11, Nomor 3, November 2017

Negara ketika melakukan penyertaan modal pada PT Istaka Karya (BUMN Persero), prinsipnya posisi Negara adalah hanya sebagai pemegang saham. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana tanggung jawab Negara dalam kasus kepailitan PT Istaka Karya ditinjau dari *Three Keywords Theory*? Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan terhadap kekayaan Negara yang dipisahkan pada PT Istaka Karya, maka risiko yang muncul merupakan risiko bisnis, bukan risiko keuangan Negara. Simpulan dalam penelitian ini adalah PT Istaka Karya merupakan BUMN yang dapat dipailitkan ditinjau dari *Three Keywords Theory*. Adanya pemisahan kekayaan Negara, maka dari aspek pengaturan, pertanggungjawaban, dan risiko, status kekayaan negara sudah berubah menjadi kekayaan PT Istaka Karya. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 73/PAILIT/2010/PN. JKT. PST terhadap kepailitan PT Istaka Karya tidak menerapkan prinsip-prinsip *Three Keywords Theory* dalam memahami keuangan negara. Adapun saran yang diberikan yaitu langkah preventif, adanya potensi kerugian terhadap risiko bisnis, Negara sebagai pemegang saham dapat berpartisipasi dalam penerapan prinsip *good corporate governance* dalam BUMN Persero. Sebagai bentuk upaya represif, maka Negara dapat meminta pertanggungjawaban hukum kepada Direksi atau perusahaan melalui proses yudisial.

Kata Kunci: kepailitan, istaka karya, *three keywords theory*

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak Ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya

Trisapto Wahyudi Agung Nugroho (Peneliti Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Optimalisasi Peran Timpora Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 11, Nomor 3, November 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana regulasi pengaturan terkait pengawasan orang asing, mekanisme pengawasan terhadap orang asing dan kendala-kendala yang dihadapi oleh TIMPORA pasca diberlakukannya PP Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan (*mix-method*) yaitu kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer (*primary data*) yaitu data lapangan yang didapatkan dari subyek data (responden) maupun data sekunder (*secondary data*) yaitu data yang dikumpulkan berdasarkan penelusuran kepustakaan yang berupa, data penelitian, peraturan-perundangan, teori-teori dan literatur yang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama: pengawasan orang asing lebih merupakan urusan kelengkapan dokumen atau administrasi keimigrasian. Kewenangan masih didominasi oleh pejabat imigrasi, instansi terkait sebatas memberikan masukan atau usulan terkait informasi orang asing. Kedua: mekanisme pengawasan administratif lebih terinci daripada pengawasan terkait keberadaan dan kegiatan orang asing. Ketiga: kendala-kendala yang ada masih terbatasnya jumlah personil, minimnya kompetensi yang dimiliki anggota TIMPORA sehingga menjadi permasalahan ketika melakukan pemantauan, pengecekan, kegiatan intelijen. Koordinasi belum berjalan dengan baik, masih ada ego sektoral dalam pelaksanaan pengawasan. Anggaran yang minim juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan orang asing. Penelitian ini juga memberikan beberapa rekomendasi kepada para pemangku kepentingan yaitu: (a) Perlu melakukan evaluasi terhadap Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, dan melakukan pengetatan terhadap negara-negara yang banyak menimbulkan masalah; (b) Perlu meningkatkan sinergitas dan koordinasi dan menghilangkan ego sektoral bagi setiap instansi baik secara formal maupun informal; (c) Perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP).

Kata Kunci: bebas visa kunjungan, imigrasi, TIMPORA

**Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak Ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya**

Budy Mulyawan (Pejabat Imigrasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Dosen Tetap pada Politeknik Imigrasi)

Kendala Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA)

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 11, Nomor 3, November 2017

Aplikasi Pelaporan Orang Asing merupakan aplikasi online yang berguna untuk membantu dan memudahkan proses pelaporan orang asing. Bagi Petugas Imigrasi, aplikasi ini dapat digunakan sebagai salah satu data maupun informasi dalam pelaksanaan pengawasan orang asing. Banyak orang yang tidak mengetahui kegunaan dari aplikasi ini, termasuk Petugas Imigrasi sendiri, bahkan ada yang menganggap bahwa aplikasi ini menambah pekerjaan atau membuang waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat Aplikasi Pelaporan Orang Asing dalam membantu pelaksanaan pengawasan Orang Asing serta bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing. Metode yang digunakan adalah yuridis empirik dengan melakukan penelitian lapangan di Direktorat Jenderal Imigrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan berbagai macam alasan, beberapa hotel/tempat penginapan maupun perorangan tidak menggunakan Aplikasi Pelaporan Orang Asing, padahal dengan melakukan registrasi dan mengisi format pelaporan yang ada dalam aplikasi, pengurus hotel/tempat penginapan maupun perorangan sudah tidak perlu lagi melaporkan keberadaan orang asing secara manual ke Kantor Imigrasi. Selain itu Kantor Imigrasi juga belum melaksanakan proses projustisia terhadap pengurus/pemilik hotel/tempat penginapan maupun perorangan yang tidak melakukan registrasi sehingga tidak menimbulkan efek jera.

Kata Kunci: kendala, implementasi, aplikasi pelaporan orang asing

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak Ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya

Muhar Junef (Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Forum MAHKUMJAKPOL-BNN-MENKES-MENSOS dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 11, Nomor 3, November 2017

Forum MAHKUMJAKPOL-BNN-MENKES-MENSOS sudah ditetapkan selama tiga tahun, namun dalam implemetasinya belum berjalan efektif dalam penanganan tindak pidana narkotika, karena belum adanya kesamaan persepsi untuk menyelesaikan masalah narkotika ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas Forum Mahkumjakpol plus dalam penanganan tindak pidana narkotika dan bagaimana penanganan narkotika dalam lembaga rehabilitasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Lokasi Penelitian dilakukan di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukan bahwa Forum MAHKUMJAKPOL-BNN-MENKES-MENSOS sudah mempunyai peraturan bersama dalam penanganan tindak pidana narkotika yang bertujuan untuk menyatukan persepsi, tetapi pada kenyataannya belum semua pihak terkait persepsinya sama sehingga dalam pelaksanaan atau dalam implementasi dari peraturan bersama tersebut belum sepenuhnya berjalan. Oleh karena itu perlu sosialisasi dan penjelasan ke seluruh instansi dan jajarannya untuk mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan narkotika dalam rangka menurunkan jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika melalui program rehabilitasi.

Kata Kunci: forum mahkumjakpol plus, penanganan tindak pidana, narkotika

**Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak Ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya**

**Nurul Qamar (Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia)
Hardianto Djanggih (Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk)**

Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-Undangan

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 11, Nomor 3, November 2017

Peranan bahasa hukum mempunyai makna yang penting dalam perumusan norma perundang-undangan. Ilmu hukum adalah disiplin ilmu yang bertengger di atas kepribadian ilmunya sendiri (sui generis), oleh karenanya ilmu hukum memiliki logikanya sendiri, yaitu logika hukum dan untuk kebutuhan, kepentingan keberfungsian keilmuannya baik bidang akademik maupun bidang praktis. Rumusan masalah yang hendak diteliti adalah bagaimana perbedaan bahasa dalam perspektif ilmu hukum dan bagaimana bahasa hukum dalam perspektif ilmu hukum. Artikel ini menitiktekan pada studi kepustakaan. Dari studi ini dapat disimpulkan bahwa ilmu hukum mempunyai bahasanya sendiri, yaitu bahasa hukum. Ilmu hukum dengan segala stratifikasi keilmuannya dan struktur atau klasifikasi hukumnya beserta segala elemen-elemen pendukung sistemnya sarat dengan bahasa-bahasa hukum yang mengandung artikulasi karakteristik sebagai bahasa keilmuan hukum dan praksis, sehingga untuk memahami disiplin keilmuannya dengan baik, maka harus menggunakan bahasanya sendiri yaitu bahasa hukum.

Kata Kunci: bahasa, hukum, perundang-undangan

Imam Lukito (Peneliti Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah dalam Pembangunan *E-Commerce*

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 11, Nomor 3, November 2017

Data statistik kegiatan perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Hal ini seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta semakin baiknya jaringan infrastruktur komunikasi. Ekonomi berbasis elektronik mempunyai potensi yang tinggi bagi Indonesia, dan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Penelitian ini mencoba menganalisa permasalahan bagaimana tantangan hukum dalam bisnis *e-commerce* dan bagaimana peran pemerintah dalam mendukung lahirnya pelaku-pelaku usaha *e-commerce* baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, bersifat deskriptif analisis dengan bentuk penelitian *desk study*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: *pertama*, tantangan hukum dalam pembangunan *e-commerce* yaitu: bentuk badan hukum, perijinan; aspek legalitas dan perlindungan hukum para pihak dalam komunitas *e-commerce*; dan *kedua*, peran pemerintah dalam pembangunan bisnis *e-commerce* adalah dengan melakukan perbaikan sistem hukum nasional sesuai dengan dinamika perkembangan telematika dan menerbitkan regulasi yang memuat aspek: pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan dan sumber daya manusia, infrastruktur jaringan komunikasi, logistik, keamanan siber dan manajemen pelaksana peta jalan *e-commerce*.

Kata Kunci: tantangan hukum, peran pemerintah, *e-commerce*